



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMAD TOHA ARAFAT
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 76748

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.395.516.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m<sup>2</sup>/24 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 64.016.000
2. Tanah Seluas 275 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. Tanah Seluas 961 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah Seluas 601 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 466.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 82.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA UNITED DOMINATE /M-03 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 150.615.261**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 724.088.820**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.352.720.081



III. HUTANG

Rp. 360.021.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.992.699.081

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.